

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

A.Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, Tahun 1985), halaman 68.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 1990), halaman 106.

Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Tahun 2009), halaman 24.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, Tahun 2007), halaman 22.

Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, Tahun 2008), halaman 31.

Amir Syamsuddin, *Pengadilan Untuk Menerima Ataupun Menolak Suatu Permohonan*, (Jurnal keadilan, Tahun 2005), halaman 87.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Indonesia: Penerbit Ghalia, Tahun 2005), halaman 88.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Tahun 2005), halaman 739.

Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 1983), halaman 103.

Dr. Niru Anita Sinaga, S.H, M.H, *Hukum Kepailitan Dan Permasalahanya Di Indonesia*, (Jurnal Universitas Surya Darma, Volume 7 , No.1, Tahun 2016), halaman 162.

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Tahun 2009), halaman 30.

Hasan Zaini S.H., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, Tahun 1984), halaman 271.

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), halaman 7.

M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Tahun 2015), halaman 74.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Tahun 1993), halaman 220-221.

Jurnal dan Artikel :

Kheriah, S.H, M,H, *Indepedensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan*, (Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 2, 2015), halaman 239.

Prof. Dr.St. Remy sjahdeini, S.H, *Hukum Bisnis, Kepailitan, Implementasi dan implekasinya*, (Jurnal Volume 33 , Nomor 1, 2014), halaman 12.

Yudi Kornelis dan Florianus Yudhi Priyo Amboro, *Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, (Jurnal Selat, Volume 7 Nomor 2, Mei 2020), halaman 259.

Peraturan Perundang-Undangan :

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.
109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Panduan Penyelesaian Perkara
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.